

01/R-IDI/5300/2015

**RINGKASAN  
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2009 - 2013**





**RINGKASAN  
INDEKS DEMOKRASI  
INDONESIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA  
TIMUR  
TAHUN 2009-2013**

**TIM PENYUSUN**

**PENGARAH : ANGGORO DWITJAHYONO**

**PENYUNTING : MARTIN SUANTA**

**PENULIS : SABAR ANTHONY NAINGGOLAN  
HADI LESTIYONO**

**PENGOLAH DATA : SABAR ANTHONY NAINGGOLAN  
DEWI RARA**



## Kata Pengantar

Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) telah dimulai sejak tahun 2007. BPS mulai terlibat langsung sejak penyusunan IDI 2009.

Pengumpulan data IDI berbeda dengan kegiatan survei BPS lainnya. Survei-survei yang dilakukan BPS pada umumnya bersifat kuantitatif dengan pendekatan rumah tangga atau perusahaan. Pada pengumpulan data IDI dilakukan gabungan survei kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui review surat kabar dan review dokumen. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui *focus group discussion* (FGD) dan wawancara mendalam (*in-depth interview*).

Sampai saat ini IDI merupakan satu-satunya ukuran kuantitatif untuk mengetahui tingkat kemajuan demokrasi di tingkat provinsi. Terkait dengan hal tersebut, keberadaan IDI menjadi sangat penting bagi perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah provinsi, partai politik, politisi, dan masyarakat dalam meningkatkan kondisi demokrasi wilayah masing-masing. Kritik dan saran untuk penyempurnaan publikasi ini di masa yang akan datang, sangat diharapkan.

Kupang, Januari 2015  
Kepala BPS Provinsi NTT,

Drs. Anggoro Dwitjahyono, M.Si  
NIP. 19630507 198501 1 001

## DAFTAR ISI

Tim Penyusun.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Pengertian IDI.....	1
Perkembangan IDI .....	7
Lampiran .....	23

<https://ntt.bps.go.id>



## Apakah IDI itu?



- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi politik provinsi di Indonesia.
- IDI telah disusun sejak tahun 2007. IDI 2007 merupakan embrio IDI berikutnya. Namun, indikator dan metode penghitungan yang digunakan dalam IDI 2007 berbeda dengan IDI sesudahnya sehingga secara teknis tidak dapat dibandingkan.
- Komponen IDI terdiri dari **3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator**

**Aspek, Variabel, dan Indikator IDI 2009 - 2014**  
**(3 aspek; 11 variabel; and 28 indikator)**

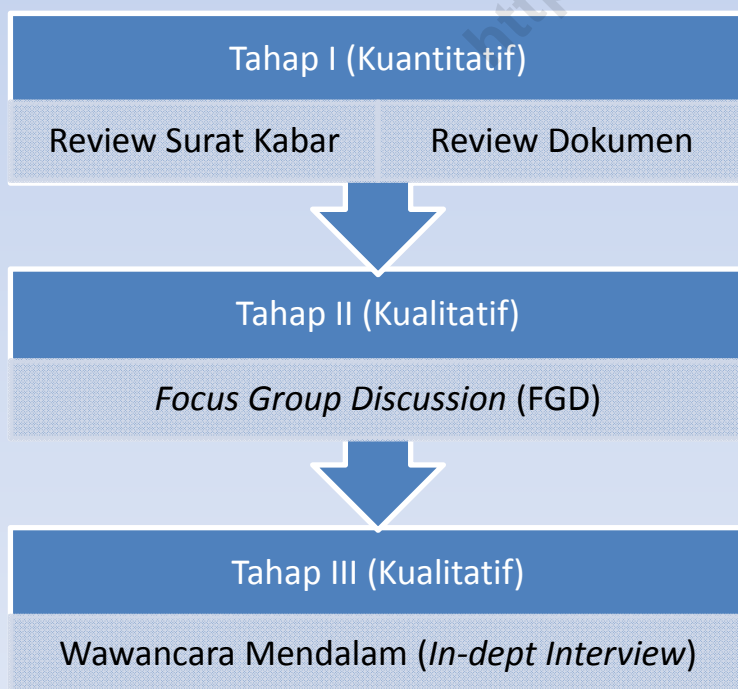
Aspek	Variabel	Indikator
Kebebasan Sipil	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	2 indikator
	Kebebasan Berpendapat	2 indikator
	Kebebasan Berkeyakinan	3 indikator
	Kebebasan dari Diskriminasi	3 indikator
Hak-Hak Politik	Hak Memilih dan Dipilih	5 indikator
	Hak Partisipasi Politik: Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	2 indikator
Lembaga Demokrasi	Pemilu yang Bebas dan Adil	2 indikator
	Peran DPRD	3 indikator
	Peran Partai Politik	2 indikator
	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	2 indikator
	Peran Peradilan yang Independen	2 indikator

## Metodologi Pengumpulan Data IDI



Metode pengumpulan data dilakukan melalui 2 pendekatan yaitu :

- ❑ Pendekatan kuantitatif  
Pendekatan kuantitatif dikumpulkan melalui review surat kabar dan review dokumen.
- ❑ Pendekatan kualitatif  
Pendekatan kualitatif dikumpulkan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam.



Rujukan awal berupa data kuantitatif sebagai sumber data utama

Kualitatif; mengkonfirmasi, meluruskan, dan melengkapi hasil review surat kabar dan dokumen



## **Review Surat Kabar dan Review Dokumen**

### **Review Surat Kabar**

- Surat kabar terkemuka di setiap provinsi periode 1 Januari – 31 Desember tiap tahunnya.
- Surat kabar telah dipilih sejak IDI 2007
- Ditentukan berdasarkan:
  - a. Oplah terbesar
  - b. Independensi
- IDI NTT menggunakan surat kabar harian Pos Kupang.

### **Review Dokumen**

- Jenis dokumen yang digunakan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan DPRD yang masih berlaku.  
contoh: perda, pergub, perbup/perwali, surat kepala dinas, dll
- Catatan administrasi resmi, seperti jumlah anggota DPRD terpilah jenis kelamin dari Sekretariat Dewan, kepengurusan partai politik terpilah jenis kelamin, data kegiatan kaderisasi dari partai politik, dll.

## ***Focus Group Discussion (FGD)***

### **Tujuan FGD IDI:**

1. Mengkonfirmasi fakta yang terkait dengan temuan review surat kabar dan dokumen.
2. Menambah informasi terkait dengan kasus-kasus yang dianggap besar/menarik.
3. Menelusuri kasus-kasus yang relevan dan belum tercatat dalam data review surat kabar dan dokumen.

### **Peserta FGD:**

1. Merupakan sumber data utama yang akan digali informasi, pengalaman, serta pengetahuan yang terkait indikator.
2. Mewakili profesi, kelompok, pengalaman, pengetahuan, jabatan, atau yang dianggap relevan lainnya.

### **Pelaksanaan FGD:**

FGD dilaksanakan dua hari, dengan rincian:

- Hari I : Kebebasan Sipil
- Hari II : Hak-hak Politik dan Kinerja Institusi Demokrasi.

### **Hasil FGD:**

Dapat melengkapi data hasil review surat kabar dan review dokumen.

## **Wawancara Mendalam (*In-dept Interview*)**

- Wawancara mendalam digunakan untuk melakukan verifikasi dan pendalaman informasi yang telah diperoleh melalui *review* surat kabar dan dokumen serta FGD.
- Dalam proses pengumpulan data, wawancara mendalam bersifat komplementer melengkapi ketiga metode lainnya.
- Wawancara mendalam dilakukan setelah FGD guna mendalami berbagai informasi terkait kasus-kasus yang belum terungkap secara maksimal dalam FGD.
- Narasumber wawancara mendalam adalah orang-orang terpilih yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas terkait indikator IDI.

## Tahapan Penghitungan IDI

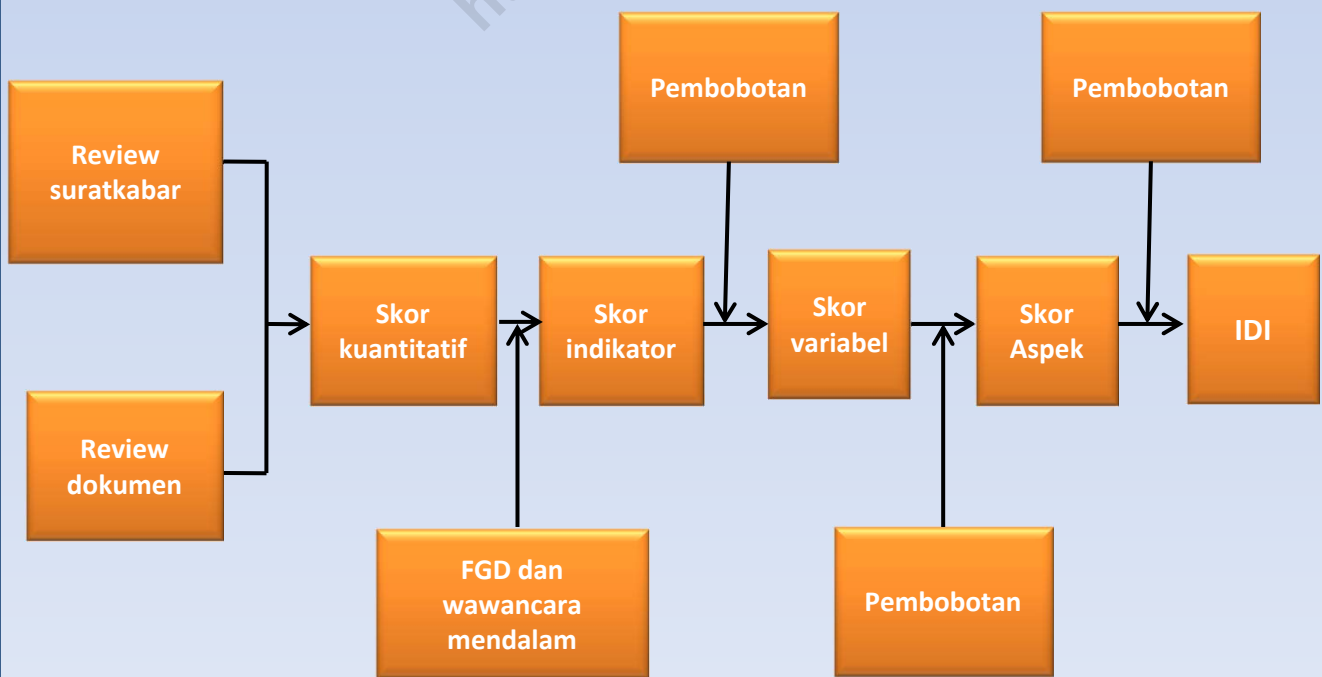


### Skala Kinerja Demokrasi

Untuk menggambarkan pencapaian kinerja demokrasi digunakan skala 0-100. Skala tersebut dibagi dalam tiga kategori kinerja demokrasi, yaitu:

- Baik, lebih besar dari 80
- Sedang antara 60 sampai dengan 80
- Kurang, lebih kecil dari 60

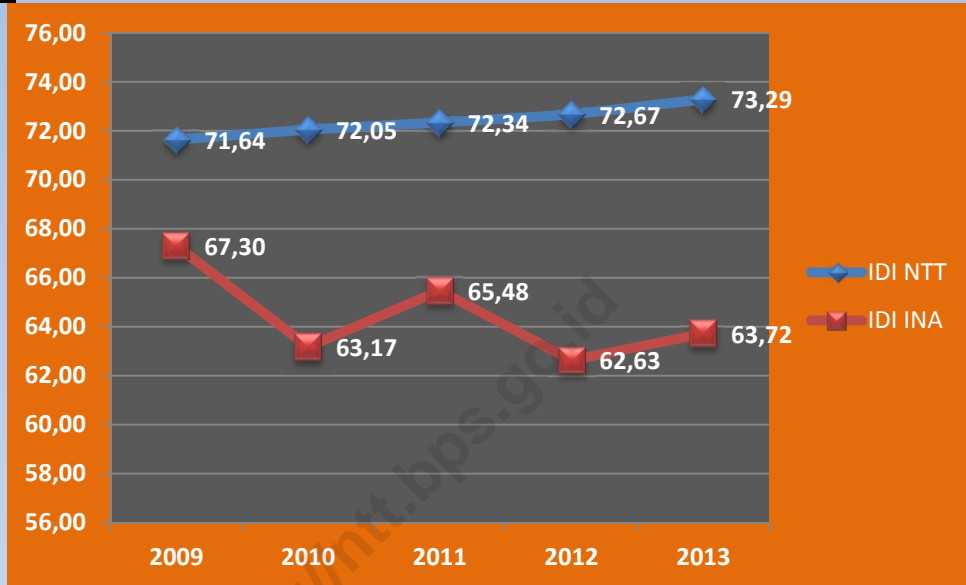
### Tahapan Penghitungan IDI



# PERKEMBANGAN IDI

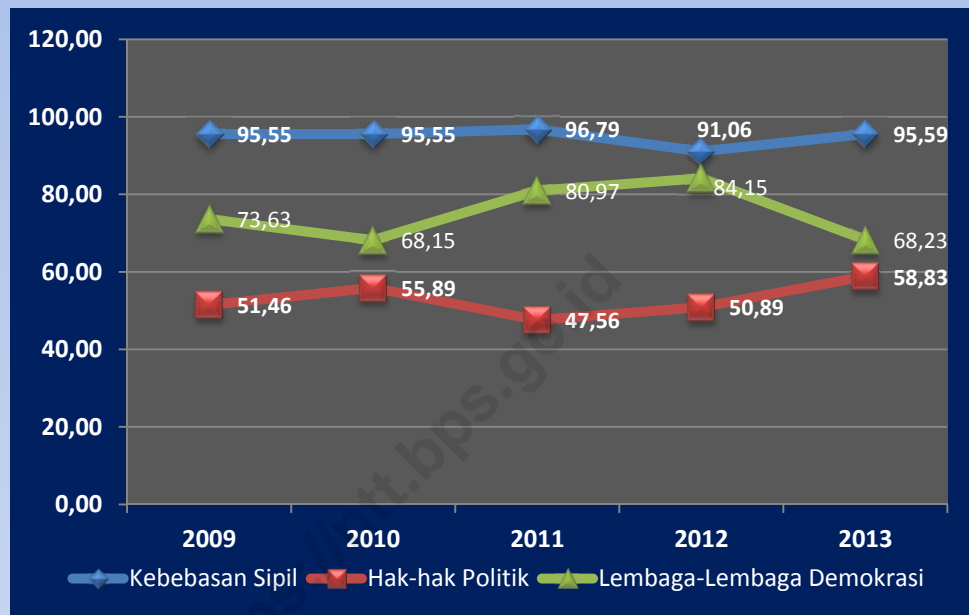
<https://ntt.bps.go.id>

## Perkembangan IDI NTT 2009 - 2013



Selama periode 2009-2013, angka IDI NTT menunjukkan tren meningkat. Angka IDI NTT 2009 sebesar 71,64 naik menjadi 73,29 pada IDI 2013 sehingga peringkat NTT yang berada di peringkat 9 dari 33 propinsi di Indonesia pada tahun 2009 naik menjadi peringkat 1 pada tahun 2013. Sementara angka IDI Indonesia sedikit mengalami fluktuasi selama periode 2009-2013.

## Perkembangan Nilai Indeks Masing-Masing Aspek, IDI NTT 2009 – 2013

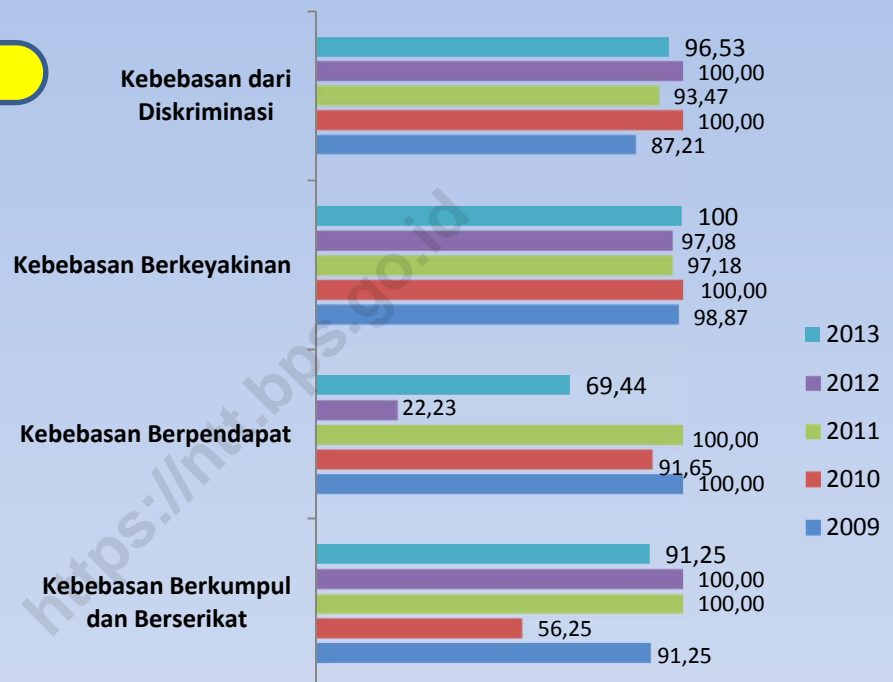


**Aspek hak-hak politik memberikan kontribusi nilai indeks paling kecil dibanding aspek kebebasan sipil dan lembaga demokrasi**

- Aspek kebebasan sipil menunjukkan nilai indeks pada level kinerja demokrasi baik namun sedikit berfluktuasi pada selama periode tahun 2009 – 2013.
- Aspek hak-hak politik menunjukkan kontribusi yang rendah dan cenderung meningkat selama periode 2009-2013. Kontribusi tertinggi ditunjukkan pada tahun 2013 yaitu sebesar 58,83.
- Aspek lembaga demokrasi menunjukkan tren fluktuatif. Tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya.

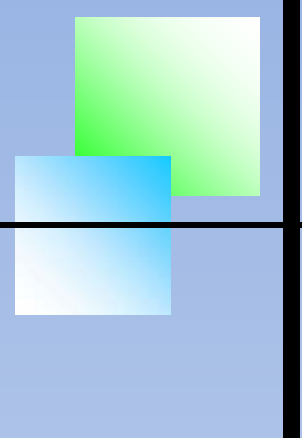
## Perkembangan Nilai Indeks Masing-Masing Variabel dalam Aspek Kebebasan Sipil, IDI NTT 2009-2013

Pada tahun 2013, nilai indeks variabel kebebasan berpendapat menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan dibanding variabel lain pada aspek kebebasan sipil.



Pada Tahun 2013 dari empat variabel dalam aspek kebebasan sipil, variabel kebebasan berkumpul dan berserikat dan variabel kebebasan dari diskriminasi menunjukkan penurunan nilai indeks dibanding tahun sebelumnya. Sebaliknya variabel kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpendapat menunjukkan kenaikan nilai indeks. Nilai indeks kebebasan berpendapat meningkat sangat signifikan pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan capaian indeks sebesar 69,44.





## Perkembangan Skor Indikator pada Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, Aspek Kebebasan Sipil Hasil IDI 2009 - 2013

	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Variabel kebebasan berkumpul dan berserikat</b>	<b>91,25</b>	<b>56,25</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>91,25</b>
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	90,00	50,00	100,00	100,00	90,00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

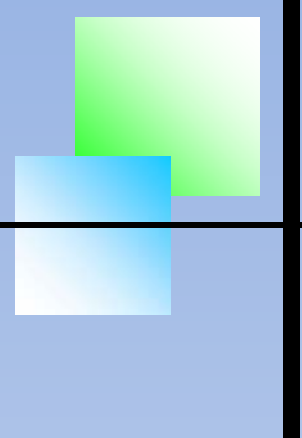
Indeks variabel kebebasan berkumpul dan berserikat disumbang oleh skor dua indikator yang terdapat didalamnya yaitu indikator jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat serta indikator jumlah jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. Selama periode 2009-2013, skor dua indikator ini menunjukkan tren positif, kecuali pada tahun 2010 yang menunjukkan skor terendah sebesar 50,00 untuk indikator jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.



## Perkembangan Skor Indikator pada Variabel Kebebasan Berpendapat, Aspek Kebebasan Sipil Hasil IDI 2009 - 2013

	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Variabel kebebasan berpendapat</b>	<b>100,00</b>	<b>91,65</b>	<b>100,00</b>	<b>22,23</b>	<b>69,44</b>
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	100,00	100,00	100,00	16,67	73,33
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	100,00	50,00	100,00	50,00	50,00

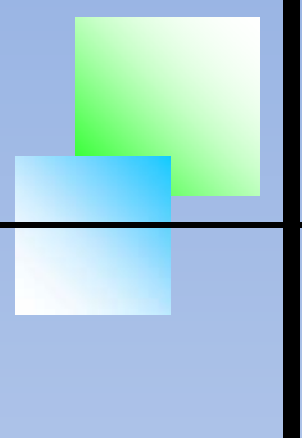
Selama periode 2009-2011, kontribusi skor dua indikator dalam variabel kebebasan berpendapat menunjukkan tren positif. Sementara pada tahun 2012 nilai indeks variabel kebebasan berpendapat menurun sangat signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang disumbang oleh penurunan skor indikator-indikatornya. Pada tahun 2012, skor indikator jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat sangat rendah sebesar 16,67 dan skor indikator jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat sebesar 50,00. Penurunan capaian indeks variabel kebebasan berpendapat yang sangat drastis pada tahun 2012 mengindikasikan adanya peningkatan kekerasan atau penggunaan kekerasan yang menghambat kebebasan berpendapat, baik dilakukan oleh aparat pemerintah daerah maupun sesama masyarakat.



**Perkembangan Skor Indikator pada  
Variabel Kebebasan Berkeyakinan,  
Aspek Kebebasan Sipil  
Hasil IDI 2009 - 2013**

	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Variabel kebebasan berkeyakinan</b>	<b>98,87</b>	<b>100,00</b>	<b>97,18</b>	<b>97,08</b>	<b>100,00</b>
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya	90,00	100,00	75,00	90,00	100,00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama	100,00	100,00	100,00	90,00	100,00

**Variabel kebebasan berkeyakinan menunjukkan tren sedikit menurun selama periode 2009-2012. Pada tahun 2012, nilai indeks variabel kebebasan berkeyakinan menunjukkan angka terendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 97,08. Akan tetapi mengalami kenaikan kembali pada tahun 2013 yaitu mencapai nilai indeks 100.**



## Perkembangan Skor Indikator pada Variabel Kebebasan dari Diskriminasi, Aspek Kebebasan Sipil Hasil IDI 2009 - 2013

	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Variabel kebebasan dari diskriminasi</b>	<b>87,21</b>	<b>100,00</b>	<b>93,47</b>	<b>100,00</b>	<b>96,53</b>
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	83,33	100,00	83,33	100,00	100,00
Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	77,50	100,00	100,00	100,00	87,50
Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Selama periode 2009-2013, variabel kebebasan dari diskriminasi menunjukkan peningkatan nilai indeks, meskipun sedikit fluktuatif di tahun 2011 dan tahun 2013. Pada tahun 2013, skor indikator pada variabel kebebasan dari diskriminasi menyumbangkan nilai indeks 96,53. Hal ini menunjukkan walaupun dalam kategori kinerja demokrasi baik tetapi terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya.**

## Perkembangan Nilai Indeks Masing-Masing Variabel dalam Aspek Hak-Hak Politik, IDI NTT 2009-2013



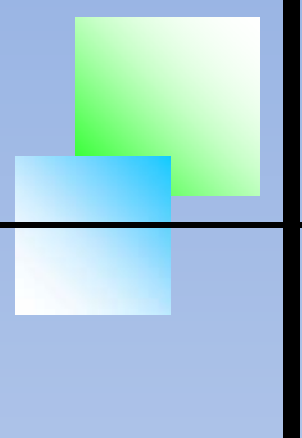
Aspek hak-hak politik menyumbang nilai indeks terkecil dibanding aspek lainnya dan menunjukkan tren meningkat selama periode 2009-2013. Nilai indeks yang rendah dan cenderung meingkat dari aspek-aspek hak-hak politik dapat dilihat dari nilai indeks dua variabel di dalamnya yang memang cenderung stagnan. Pada variabel hak memilih dan dipilih nilai indeks tidak pernah berubah dari capaian tahun-tahun sebelumnya. Sementara variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan menunjukkan tren meningkat, pada tahun 2009 mencapai nilai indeks sebesar 52,65 dan 67,39 pada tahun 2013.



## Perkembangan Skor Indikator pada Variabel Hak Memilih dan Dipilih, Aspek Hak-Hak Politik Hasil IDI 2009 - 2013

	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Variabel hak memilih dan dipilih</b>	<b>50,26</b>	<b>50,26</b>	<b>50,26</b>	<b>50,26</b>	<b>50,26</b>
Kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat	94,23	94,23	94,23	94,23	94,23
Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Kualitas daftar pemilih tetap	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu ( <i>voters turnout</i> )	81,40	81,40	81,40	81,40	81,40
Persentase perempuan di DPRD provinsi dan kabupaten/kota	24,24	24,24	24,24	24,24	24,24

Variabel ini merujuk pada pemilu legislatif 2009 sehingga skor indikator yang dihasilkan tidak mengalami perubahan, kecuali indikator persentase perempuan di DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang memungkinkan terjadi perubahan. Namun, skor indikator persentase perempuan di DPRD provinsi dan kabupaten/kota untuk NTT tidak mengalami perubahan selama periode 2009-2012.

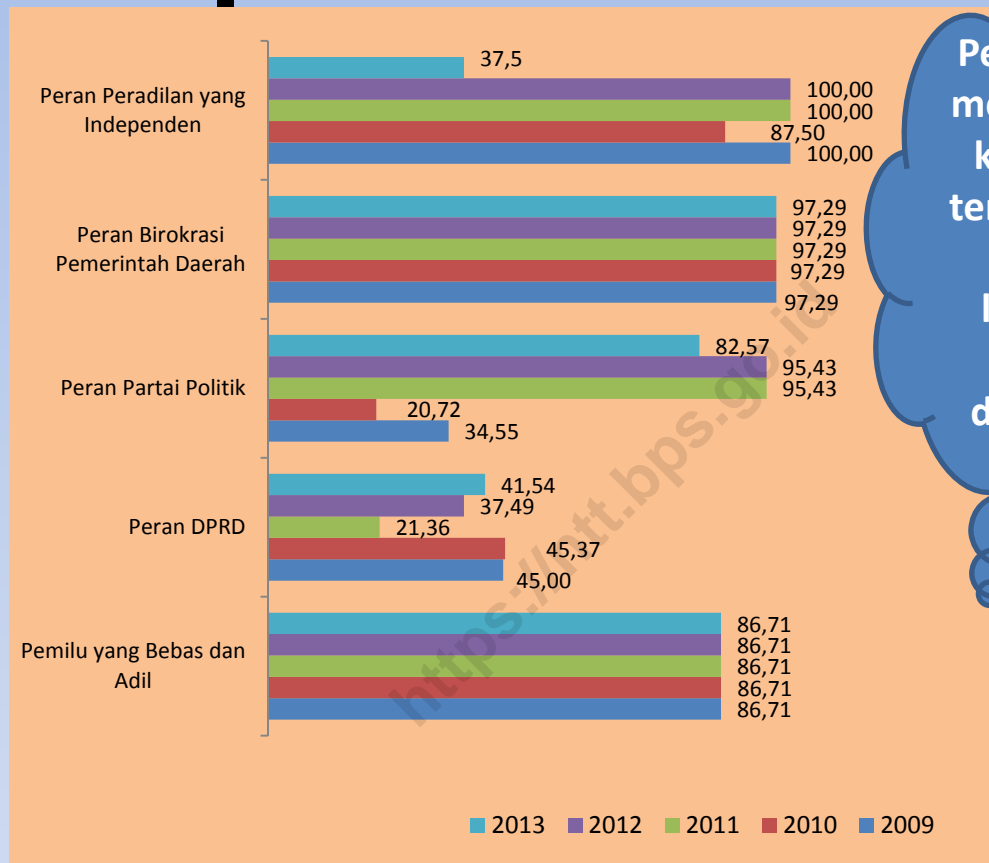


## Perkembangan Skor Indikator pada Variabel Hak Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan, Aspek Hak-Hak Politik Hasil IDI 2009 - 2013

	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan</b>	<b>52,65</b>	<b>61,53</b>	<b>44,86</b>	<b>51,52</b>	<b>67,39</b>
Persentase demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan terhadap total demonstrasi/mogok	86,96	47,83	0,00	3,04	34,78
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	18,35	75,23	89,72	100,00	100,00

Indeks variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan disumbang oleh skor dua indikator didalamnya. Selama 2009-2013, skor dua indikator yang termasuk dalam variabel ini menunjukkan dua perkembangan yang berlawanan. Skor indikator pertama, demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan menunjukkan tren penurunan. Sementara skor indikator kedua, yaitu pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yaitu dari 18,35 pada tahun 2009 menjadi 100,00 pada tahun 2012 dan 2013. Hal ini menunjukkan semakin tingginya partisipasi politik warga masyarakat terkait pengaduan tentang berbagai hal terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

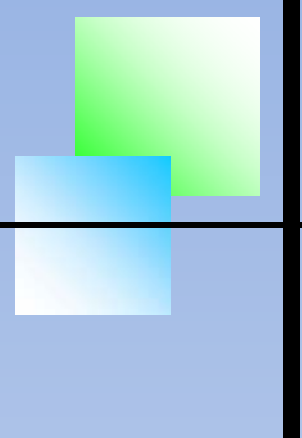
## Perkembangan Nilai Indeks Masing-Masing Variabel dalam Aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi, IDI NTT 2009-2013



Peran DPRD memberikan kontribusi terkecil pada aspek lembaga-lembaga demokrasi

Aspek lembaga-lembaga demokrasi terdiri dari 5 variabel. Dua variabel merujuk pada pemilu legislatif 2009 sehingga nilai indeks yang dihasilkan tidak mengalami perubahan yaitu variabel pemilu yang bebas dan adil serta peran birokrasi pemerintah daerah. Kontribusi nilai indeks dua variabel lainnya yaitu variabel peran parpol dan peran peradilan yang independen mengalami penurunan nilai indeks pada tahun 2013 dibanding tahun sebelumnya. Sementara untuk periode yang sama, nilai indeks variabel peran DPRD mengalami kenaikan nilai indeks, dimana pada tahun 2013 mencapai nilai indeks 41,54.





## Perkembangan Skor Indikator pada Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil, Aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi Hasil IDI 2009 - 2013

	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Variabel Pemilu yang bebas dan adil</b>	<b>86,71</b>	<b>86,71</b>	<b>86,71</b>	<b>86,71</b>	<b>86,71</b>
Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara	73,42	73,42	73,42	73,42	73,42

**Variabel ini merujuk pada pemilu legislatif 2009 sehingga nilai indeks yang dihasilkan tidak mengalami perubahan**



## Perkembangan Skor Indikator pada Variabel Peran DPRD, Aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi Hasil IDI 2009 - 2013

	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Variabel peran DPRD</b>	<b>45,00</b>	<b>45,37</b>	<b>21,36</b>	<b>37,49</b>	<b>41,54</b>
Besaran alokasi anggaran pendidikan	36,35	35,47	29,90	16,55	15,18
Besaran alokasi anggaran kesehatan	100,00	100,00	26,82	78,35	79,30
Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan	0,00	0,00	0,00	10,00	7,14
Rekomendasi DPRD kepada eksekutif	0,00	3,57	14,29	25,00	50,00

**Selama periode 2009-2013, kontribusi skor indikator besaran alokasi anggaran pendidikan menunjukkan tren menurun yaitu dari 36,35 pada tahun 2009 menjadi 15,18 pada tahun 2013. Sebaliknya, indikator persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan dan indikator rekomendasi DPRD kepada eksekutif menunjukkan tren meningkat pada periode yang sama.**



## Perkembangan Skor Indikator pada Variabel Peran Parpol, Aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi Hasil IDI 2009 - 2013

	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Variabel peran parpol</b>	<b>34,55</b>	<b>20,72</b>	<b>95,43</b>	<b>95,43</b>	<b>82,57</b>
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	28,57	14,29	100,00	100,00	85,71
Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi	88,35	78,67	54,26	54,26	54,26

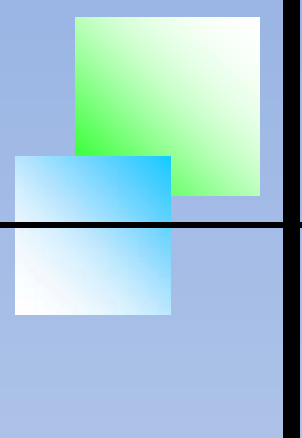
**Pada tahun 2011-2013, variabel peran partai politik mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan periode 2009-2010. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai politik peserta pemilu. Sementara persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi menunjukkan tren menurun selama periode 2009-2011 dan stagnan pada periode 2011-2013**



## Perkembangan Skor Indikator pada Variabel Peran Birokrasi Pemda, Aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi Hasil IDI 2009 - 2013

	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Variabel peran birokrasi Pemda</b>	<b>97,29</b>	<b>97,29</b>	<b>97,29</b>	<b>97,29</b>	<b>97,29</b>
Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon /parpol tertentu dalam pemilu legislatif	99,12	99,12	99,12	99,12	99,12
Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif	95,45	95,45	95,45	95,45	95,45

**Variabel ini merujuk pada pemilu legislatif 2009  
sehingga nilai indeks yang dihasilkan tidak  
mengalami perubahan**



**Perkembangan Skor Indikator pada  
Variabel Peran Peradilan yang Independen,  
Aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi  
Hasil IDI 2009 - 2013**

	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Variabel peran peradilan yang independen</b>	<b>100,00</b>	<b>87,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>37,5</b>
Keputusan hakim yang kontroversial	100,00	75,00	100,00	100,00	75,00
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

**Selama periode 2009-2013, variabel peran peradilan yang independen mengalami penurunan. Pada tahun 2013 ditemukan keputusan hakim yang kontroversial dan adanya penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa dan polisi sehingga nilai indeks mengalami penurunan pada indikator tersebut.**

# LAMPIRAN

<https://ntt.kem.go.id>

## LAMPIRAN

**Tabel 1. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi , Tahun 2009**

Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
		Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga-lembaga Demokrasi
NAD	66,29	64,42	70,39	62,13
Sumut	60,20	84,16	41,26	60,14
Sumbar	60,29	63,06	53,57	67,48
Riau	75,85	93,14	65,40	70,68
Jambi	71,00	95,86	50,41	72,43
Sumsel	72,52	95,42	56,07	69,83
Bengkulu	64,76	94,26	54,03	44,70
Lampung	67,47	90,57	51,81	63,27
Babel	67,01	96,51	48,29	59,65
Kep. Riau	73,61	96,22	59,47	67,62
DKI Jakarta	73,91	91,65	52,20	86,09
Jawa Barat	71,07	85,84	68,48	56,61
Jawa Tengah	66,45	86,48	51,85	64,43
DIY	67,55	92,15	52,52	60,48
Jawa Timur	62,49	83,30	50,96	54,64
Banten	67,98	95,46	49,47	62,83
Bali	70,35	93,97	49,82	73,24
NTB	58,12	68,05	47,50	62,48
<b>NTT</b>	<b>71,64</b>	<b>95,55</b>	<b>51,46</b>	<b>73,63</b>
Kalbar	72,38	98,29	53,46	69,85
Kalteng	77,63	98,45	60,50	78,69
Kalsel	66,63	68,24	62,63	70,95
Kaltim	72,31	98,22	54,78	67,57
Sulut	70,94	92,23	58,50	63,91
Sulteng	66,02	98,51	45,90	57,14
Sulsel	61,48	82,94	42,36	64,88
Sultra	64,29	94,66	43,97	58,37
Gorontalo	73,50	96,05	56,39	73,32
Sulbar	67,99	93,82	53,09	59,15
Maluku	69,07	92,77	52,05	66,30
Maluku Barat	67,21	93,61	46,30	67,23
Papua Barat	63,06	93,14	37,09	66,48
Papua	63,80	92,83	43,84	58,97
<b>INDONESIA</b>	<b>67,30</b>	<b>86,97</b>	<b>54,60</b>	<b>62,72</b>

## LAMPIRAN

**Tabel 2. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2010**

Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
		Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga-lembaga Demokrasi
NAD	65.36	69.98	62.63	63.87
Sumut	63.45	76.64	57.42	56.45
Sumbar	63.04	58.34	63.90	67.59
Riau	71.45	91.02	47.19	85.39
Jambi	65.88	85.15	48.14	69.81
Sumsel	73.65	100.00	55.17	69.85
Bengkulu	70.78	94.40	64.35	51.29
Lampung	67.80	94.39	53.90	56.44
Babel	65.94	85.95	48.44	68.57
Kep. Riau	62.89	87.04	39.80	69.20
DKI Jakarta	77.44	92.46	56.19	92.30
Jawa Barat	59.41	74.41	46.74	60.67
Jawa Tengah	63.42	84.83	46.29	63.70
DIY	74.33	91.24	55.96	82.25
Jawa Timur	55.12	78.48	42.06	46.47
Banten	60.60	83.17	38.70	66.99
Bali	72.44	94.10	51.52	78.43
NTB	58.13	67.22	46.48	65.19
<b>NTT</b>	<b>72.05</b>	<b>95.55</b>	<b>55.89</b>	<b>68.15</b>
Kalbar	69.32	99.17	45.19	70.11
Kalteng	71.10	94.51	56.05	65.57
Kalsel	70.94	67.74	72.66	72.25
Kaltim	73.04	97.79	53.89	72.34
Sulut	65.94	92.98	44.90	65.34
Sulteng	66.63	92.19	51.82	58.01
Sulsel	56.67	78.19	32.40	68.17
Sultra	54.79	83.71	30.46	57.06
Gorontalo	64.97	82.55	51.72	63.90
Sulbar	67.57	94.48	47.22	66.06
Maluku	69.51	96.22	48.12	69.89
Maluku Barat	59.92	92.59	30.82	65.06
Papua Barat	67.75	99.84	44.24	64.73
Papua	60.26	90.72	31.76	67.22
<b>INDONESIA</b>	<b>63.17</b>	<b>82.53</b>	<b>47.87</b>	<b>63.11</b>



## LAMPIRAN

**Tabel 3. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2011**

Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
		Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga-lembaga Demokrasi
NAD	55,54	58,65	47,90	63,77
Sumut	66,15	79,23	59,47	60,31
Sumbar	65,02	60,57	59,21	79,83
Riau	70,65	83,12	52,90	83,18
Jambi	70,46	91,62	46,27	82,27
Sumsel	67,92	84,05	49,41	77,05
Bengkulu	71,36	94,10	59,47	61,63
Lampung	74,08	93,14	61,15	70,64
Babel	67,13	88,27	47,11	72,33
Kep. Riau	70,78	87,15	56,00	73,66
DKI Jakarta	77,81	89,94	58,32	93,50
Jawa Barat	66,18	78,92	46,42	81,55
Jawa Tengah	65,59	84,05	46,29	73,04
DIY	71,67	87,22	52,35	82,81
Jawa Timur	55,98	71,58	40,32	61,23
Banten	67,37	80,41	44,57	87,18
Bali	74,20	95,44	50,08	85,79
NTB	54,49	55,45	49,60	61,06
<b>NTT</b>	<b>72,34</b>	<b>96,79</b>	<b>47,56</b>	<b>80,97</b>
Kalbar	74,86	97,15	49,34	87,38
Kalteng	76,28	92,56	54,73	90,04
Kalsel	66,47	56,33	64,25	82,76
Kaltim	66,37	91,84	45,12	68,10
Sulut	71,19	98,44	52,86	66,03
Sulteng	64,00	92,23	37,01	71,36
Sulsel	65,31	80,97	39,33	86,87
Sultra	57,56	85,81	29,18	67,11
Gorontalo	62,77	81,80	44,36	68,08
Sulbar	66,36	94,80	42,65	68,26
Maluku	68,38	90,70	46,14	75,61
Maluku Barat	59,17	90,04	32,61	62,56
Papua Barat	61,78	93,59	43,99	50,03
Papua	59,05	87,73	29,43	70,04
<b>INDONESIA</b>	<b>65,48</b>	<b>80,79</b>	<b>47,54</b>	<b>74,72</b>

## LAMPIRAN

**Tabel 4. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2012**

Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
		Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga-lembaga Demokrasi
NAD	54,02	60,16	47,16	57,21
Sumut	58,51	73,85	49,82	53,01
Sumbar	60,82	57,10	50,85	81,32
Riau	67,00	80,21	47,16	81,89
Jambi	68,81	86,23	46,60	82,18
Sumsel	73,17	93,26	55,21	76,42
Bengkulu	61,70	77,76	48,93	61,79
Lampung	72,26	94,14	50,60	79,16
Babel	69,37	83,09	51,21	80,97
Kep. Riau	65,61	82,68	49,98	68,95
DKI Jakarta	77,72	88,11	62,52	88,81
Jawa Barat	57,05	65,93	46,58	62,51
Jawa Tengah	63,79	75,03	46,29	77,46
DIY	72,96	87,39	55,52	82,52
Jawa Timur	54,99	80,97	36,17	52,22
Banten	65,29	79,20	51,03	70,42
Bali	71,75	94,18	45,00	86,01
NTB	57,97	58,31	49,60	70,85
<b>NTT</b>	<b>72,67</b>	<b>91,06</b>	<b>50,89</b>	<b>84,15</b>
Kalbar	65,38	92,37	37,18	76,23
Kalteng	65,78	68,44	51,05	85,82
Kalsel	61,13	49,51	52,59	89,33
Kaltim	71,23	97,16	51,69	69,68
Sulut	76,50	95,64	58,65	80,77
Sulteng	64,97	93,43	37,65	72,55
Sulsel	68,55	87,07	43,74	84,66
Sultra	57,26	91,39	29,50	58,44
Gorontalo	59,37	73,25	50,76	55,59
Sulbar	63,65	88,67	35,92	76,22
Maluku	59,68	76,05	45,08	62,27
Maluku Barat	66,83	88,15	50,13	66,55
Papua Barat	65,70	94,42	45,74	61,27
Papua	60,71	91,11	32,99	66,50
<b>INDONESIA</b>	<b>62,63</b>	<b>77,94</b>	<b>46,33</b>	<b>69,28</b>

## LAMPIRAN

**Tabel 5. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2013**

Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
		Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga-lembaga Demokrasi
NAD	63,56	71,78	48,59	76,97
Sumut	58,80	73,65	49,50	54,90
Sumbar	54,11	54,88	38,97	77,17
Riau	68,37	77,71	52,19	82,32
Jambi	64,41	84,95	41,91	74,34
Sumsel	67,12	91,45	50,32	63,22
Bengkulu	59,17	71,57	49,28	59,28
Lampung	63,13	70,75	45,47	81,58
Babel	68,79	85,16	50,60	77,09
Kep. Riau	66,50	80,08	49,63	76,21
DKI Jakarta	71,18	88,72	55,08	74,69
Jawa Barat	65,18	79,84	46,74	76,05
Jawa Tengah	60,84	79,18	46,29	60,89
DIY	72,36	90,78	50,65	83,69
Jawa Timur	59,32	71,37	35,43	82,10
Banten	69,79	81,39	51,03	85,00
Bali	72,22	92,55	52,87	77,38
NTB	57,22	59,68	49,60	66,24
<b>NTT</b>	<b>73,29</b>	<b>95,59</b>	<b>58,83</b>	<b>68,23</b>
Kalbar	67,52	97,54	49,36	58,61
Kalteng	64,15	81,89	50,69	63,21
Kalsel	63,71	58,03	56,35	82,54
Kaltim	68,13	92,14	55,36	58,20
Sulut	73,11	92,44	62,55	65,56
Sulteng	64,50	90,03	36,78	76,44
Sulsel	65,20	81,30	50,62	68,10
Sultra	52,61	84,32	28,95	50,32
Gorontalo	67,21	79,31	58,26	66,22
Sulbar	64,02	88,51	44,05	64,94
Maluku	66,23	81,52	50,53	71,95
Maluku Barat	64,06	83,67	48,94	63,40
Papua Barat	60,70	92,33	35,93	60,26
Papua	60,92	90,21	31,37	71,01
<b>INDONESIA</b>	<b>63,72</b>	<b>79,00</b>	<b>46,25</b>	<b>72,14</b>



# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**Badan Pusat Statistik Provinsi NTT**

Jl. R. Suprpto No. 5 Kupang 85111

Telp.: (0380) 826289, 821755, Fax: (0380) 833124

E-mail: [bps5300@bps.go.id](mailto:bps5300@bps.go.id)

Web site: <http://ntt.bps.go.id>